“KAMI BAGAIKAN MUSUH DALAM PEPERANGAN”

PENAHANAN MASSAL, PENYIKSAAN, DAN PERSEKUSI TIONGKOK TERHADAP MUSLIM DI XINJIANG

Amnesty International adalah sebuah gerakan dari 10 juta orang yang memobilisasi rasa kemanusiaan tiap orang dan berkampanye untuk perubahan agar kita semua bisa menikmati hak asasi.

Visi kami adalah dunia di mana mereka yang berkuasa menepati janji, menghormati hukum internasional dan bertanggungjawab akan tindakan mereka.

Kami menerapkan prinsip independen dari kepentingan-kepentingan pemerintah, ideologi politik, ekonomi atau agama dan sebagian besar dibiayai oleh anggota kami atau sumbangan individu.

Kami percaya bahwa solidaritas dan rasa saling memahami yang digalang bersama-sama bisa mengubah masyarakat kita menjadi lebih baik.

Catatan pada ilustrasi: *Guards surround a large group of detainees in an internment camp in Xinjiang, China.*

© Molly Crabapple

© Amnesty International 2021

Kecuali disebutkan lain, isi dalam dokumen ini berlisensi dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, non-komersial, tanpa derivatif, internasional 4.0). Https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Untuk informasi lebih lanjut harap hubungi laman perizinan di situs kami: www.amnesty.org

Ketika materi diatribusi kepada pemilik hak cipta selain Amnesty International maka materi tersebut tidak menjadi subjek lisensi Creative Commons.

Diterbitkan pertama kali pada tahun 2021 oleh Amnesty International Ltd, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UK

INDEKS: ASA 17/4137/2021

BAHASA ASLI: INGGRIS

amnesty.org

AMNESTY INTERNATIONAL

“KAMI BAGAIKAN MUSUH DALAM PEPERANGAN”

PENAHANAN MASSAL, PENYIKSAAN, DAN PERSEKUSI TIONGKOK TERHADAP MUSLIM DI XINJIANG

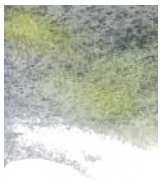

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak tahun 2017, berselubungkan kampanye melawan "terorisme", pemerintah Tiongkok menjalankan perlakuan sewenang-wenang secara masif dan sistematis terhadap warga muslim di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (Xinjiang). Bertolak belakang dari respon yang sah terhadap kemungkinan ancaman teroris, kampanye pemerintah justru memperlihatkan secara jelas niat menargetkan bagian-bagian dari populasi Xinjiang secara kolektif berdasarkan agama dan etnisitas, serta menggunakan kekerasan dan intimidasi berat untuk memberangus kepercayaan agama Islam dan praktik-praktik etnik-budaya muslim keturkian. Pemerintah berencana mengganti keyakinan dan praktik tersebut dengan pandangan dan perilaku yang direstui negara, serta pada akhirnya, mengasimilasi paksa anggota-anggota kelompok eknis tersebut ke bangsa Tiongkok yang homogen dengan bahasa dan budaya tunggal serta loyalitas tak terbatas pada Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Untuk mencapai indoktrinasi politik dan asimilasi budaya paksa tersebut, pemerintah menjalankan kampanye penahanan massal secara sewenang-wenang. Sejumlah besar pria dan wanita dari kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam telah ditahan. Mereka termasuk ratusan ribu orang yang telah dikirim ke penjara serta ratusan ribu orang – mungkin satu juta atau lebih – yang telah dikirim ke lokasi yang disebut oleh pemerintah sebagai pusat "pelatihan" atau "pendidikan". Tahanan di kamp-kamp ini mengalami kampanye indoktrinasi tanpa henti serta siksaan fisik dan psikologis serta berbagai bentuk perlakuan buruk lainnya.

Sistem kamp tahanan adalah bagian dari kampanye yang lebih besar untuk menundukkan dan memaksa asimilasi etnik minoritas di Xinjiang. Pemerintah Tiongkok telah menjalankan kebijakan meluas lainnya yang sangat mengekang muslim di Xinjiang. Kebijakan ini melanggar berbagai Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak kebebasan dan keamanan seseorang; hak privasi; hak atas kebebasan bergerak; hak mengeluarkan pendapat dan berekspresi; hak berpikir, berhatinurani, beragama, dan berkepercayaan; hak partisipasi di kehidupan budaya; dan hak kesamaan dan non-diskriminasi. Pelanggaran tersebut dijalankan secara luas dan sistematis sampai menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari jutaan warga etnis minoritas yang anggotanya sebagian besar beragama Islam di Xinjiang.

Pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah-langkah ekstrem untuk mencegah pendokumentasian informasi akurat tentang situasi di Xinjiang, dan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang kehidupan di kamp tahanan sangatlah sulit. Antara bulan Oktober 2019 dan Mei 2021, Amnesty International mewawancarai puluhan mantan tahanan dan orang lainnya yang berada di Xinjiang sejak tahun 2017, sebagian besar tidak pernah berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka sebelumnya. Kesaksian mantan tahanan ini mewakili jumlah yang signifikan dari semua bukti-bukti kesaksian publik yang dikumpulkan tentang situasi di kamp tahanan sejak tahun 2017.

Bukti-bukti yang dikumpulkan Amnesty International menyediakan sebuah basis fakta untuk menyimpulkan pemerintah Tiongkok telah melakukan paling tidak kejahatan atas kemanusiaan sebagai berikut; penahanan atau pengurangan berat kebebasan fisik yang melanggar aturan dasar dari hukum internasional; penyiksaan; dan persekusi.

Amnesty International mewawancarai 55 orang yang pernah ditahan di kamp tahanan dan kemudian dibebaskan. Semuanya ditahan secara sewenang-wenang dengan apa yang tampaknya, dengan

semua standar yang wajar, sebuah tindakan hukum; tanpa melakukan pelanggaran pidana yang diakui secara internasional. Proses penahanan di kamp tersebut tampaknya beroperasi di luar ranah sistem pidana Tiongkok atau hukum domestik lainnya. Menurut dokumen pemerintah dan pernyataan pejabat pemerintah, penerapan prosedur pidana tidak seharusnya dilakukan karena orang-orang di kamp datang secara "sukarela" dan bukan pelanggar pidana. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan oleh kesaksian dan bukti-bukti di laporan ini, kedatangan mereka ke kamp tidak terjadi secara sukarela, dan kondisi di kamp merendahkan martabat manusia.

Aiman, seorang pejabat pemerintahan yang berpartisipasi dalam penangkapan massal, menceritakan pada Amnesty, bagaimana pada akhir 2017, polisi menangkap orang dari rumah mereka tanpa peringatan, bagaimana keluarga orang yang ditahan bereaksi, dan apa peran kader-kader pemerintah dalam proses tersebut:

"Saya disana… Polisi mengambil orang-orang dari rumah mereka… dengan tangan diborgol di belakang, termasuk perempuan… mereka dipasangi tutup kepala hitam… Tidak ada yang bisa melawan. Bayangkan bila tiba-tiba sekelompok orang [polisi] masuk [rumahmu], memborgolmu dan memasang [tutup kepala hitam] dikepalamu… Sangat menyedihkan… [Setelahnya] saya menangis… Malam tersebut kami melakukan 60 penangkapan… Ini hanya di satu distrik [dari banyak yang orang-orang ditangkapi]… Setiap hari mereka menangkap lebih banyak orang lagi.

Orang-orang yang diwawancarai Amnesty International mengatakan, alasan yang diberikan pada mereka perihal penahanan seringkali tidak terkait tindakan tertentu, tahanan diberitahu mereka ditahan karena diklasifikasikan sebagai "mencurigakan" atau "tidak bisa dipercaya" atau sebagai "teroris" bahkan ëkstremis". Ketika tindakan spesifik disebutkan, mereka secara umum masuk ke beberapa kategori yang luas. Salah satu kategori memasukkan pelanggaran terkait negara asing. Banyak mantan tahanan dikirim ke kamp karena hidup, berpergian atau mengenyam pendidikan di luar negeri atau berkomunikasi dengan orang di luar negeri. Bahkan banyak yang ditahan hanya karena "berhubungan" dengan orang yang tinggal, berpergian, belajar atau berkomunikasi dengan orang di luar negeri. Kategori tahanan lainnya adalah pelanggaran terkait penggunaan perangkat lunak atau teknologi komunikasi digital yang tidak diizinkan. Kategori umum lainnya adalah apa pun yang terkait dengan agama. Mantan tahanan dikirim ke kamp dengan alasan terkait kepercayaan atau praktik Islam, termasuk bekerja di masjid, shalat, memiliki sajadah, atau memiliki gambar atau video dengan tema keagamaan.

Dianalisis bersamaan dengan kesaksian dan bukti dokumentasi lain yang dikumpulkan oleh para jurnalis dan organisasi-organisasi lain, bukti-bukti kesaksian yang dikumpulkan Amnesty International menunjukkan anggota etnis minoritas di Xinjiang sering ditahan dengan alasan "Ikut bersalah karena asosiasi dengan orang lain". Banyak yang ditahan hanya berdasarkan hubungan, atau dugaan serta anggapan hubungan, dengan keluarga, teman, anggota komunitas – banyak dari mereka, bila bukan hampir semua, tidak bersalah dari tindak pidana yang diakui secara internasional.

Di kamp tahanan, semua tahanan dipaparkan pada kampanye indoktrinasi tanpa henti serta siksaan fisik dan psikologis serta perlakuan buruk lainnya. Sejak mereka masuk kamp, kehidupan para tahanan dikontrol secara ketat. Kebebasan pribadi mereka dilucuti, dengan setiap aspek kehidupan didiktekan. Tahanan yang melenceng dari perilaku yang diperbolehkan oleh otoritas kamp – bahkan yang paling ringan sekalipun – akan ditegur dan dihukum fisik secara reguler, seringkali dihukum berbarengan dengan rekan ruangan tahanan mereka.

Tahanan tidak memiliki privasi. Mereka dimonitor setiap saat, termasuk ketika mereka makan, tidur, dan menggunakan toilet. Mereka dilarang berbicara bebas dengan tahanan lainnya. Ketika tahanan diperbolehkan bicara – dengan sesama tahanan, penjaga, atau guru – mereka diharuskan menggunakan bahasa Mandarin, bahasa yang bagi mereka, terutama orang tua dan mereka yang dari

pedesaan di Xinjiang, tidak mereka kuasai atau pahami. Tahanan sering dihukum fisik jika mereka berbicara dalam bahasa selain bahasa Mandarin.

Mereka mengalami kekurangan makanan, minuman, olahraga, perawatan kesehatan, sanitasi, serta kondisi higienis, udara bersih, dan sinar matahari. Tahanan mengalami pembatasan ketat dalam izin buang air kecil dan besar. Semua tahanan diharuskan "bekerja" satu atau dua jam shift untuk memonitor rekan tahanan mereka tiap malam. Banyak mantan tahanan melaporkan selama beberapa hari, minggu atau bulan pertama sejak kedatangan mereka di kamp tahanan, mereka dipaksa untuk tidak melakukan apa pun selain duduk diam – sering dalam posisi yang sangat tidak nyaman – seharian.

Pada titik tertentu setelah kedatangan mereka, hampir semua tahanan dimasukkan dalam kelas-kelas yang dikontrol ketat. Jadwal pada umumnya termasuk tiga atau empat jam sesi kelas setelah sarapan. Lalu para tahanan diberikan makan siang dan "istirahat" sebentar yang terkadang melibatkan duduk diam di kursi atau dengan kepala mereka tetap ada di atas meja. Setelah makan siang ada tiga atau empat jam lagi sesi kelas sebelum makan malam, diikuti oleh beberapa jam duduk atau berlutut di kursi dan secara diam "mengevaluasi" materi hari tersebut atau menonton lebih banyak video-video "edukatif". Hampir setiap saat selama kelas berlangsung, tahanan diharuskan menatap lurus kedepan dan tidak berbicara dengan rekan sekelas mereka. Kelas tersebut sering mengharuskan menghafal dan menyanyikan lagu-lagu "merah" – yaitu lagu revolusioner memuji PKT dan Republik Rakyat Tiongkok.

Mengajari bahasa Tiongkok merupakan tujuan utama "pendidikan" yang diterima para tahanan di kamp. Selain kelas bahasa, kebanyakan mantan tahanan melaporkan menghadiri kombinasi kelas sejarah, hukum dan ideologi, atau yang sering disebut oleh banyak mantan tahanan sebagai "pendidikan politik". Fokus sebagian besar kelas tersebut adalah mengindoktrinasi paksa tahanan tentang "keburukan" dalam Islam dan tentang bagaimana Tiongkok, PKT dan Presiden Xi Jinping sebagai sangat sejahtera, kuat, dan "baik hati". Yerulan mengatakan pada Amnesty dia yakin bahwa kelas pendidikan politik dimaksudkan untuk mencegah para tahanan menjalankan agama mereka:

"Saya rasa tujuan [kelas-kelas] untuk menghancurkan agama kami dan mengasimilasi kami… Mereka bilang kami tidak boleh mengatakan *'as-salamu-alaykum'* dan ketika ditanya soal etnisitas kami harus menjawab "Tiongkok"… Mereka mengatakan kamu tidak boleh menjalankan Shalat Jumat… Dan bukan Allah yang memberikan kamu segalanya, melainkan Xi Jinping. Anda tidak boleh berterimakasih pada Allah; anda harus berterimakasih pada Xi Jinping untuk segalanya."

Tahanan ditanya atau diinterogasi secara rutin. Mereka sering dipaksa menulis surat "pengakuan" atau "kritik-diri". Selain mengakui "kesalahan" diri sendiri, kritik diri juga mendeskripsikan secara tertulis kesalahan yang dilakukan tahanan, serta menjelaskan pendidikan yang mereka terima membuat mereka sadar akan kesalahan mereka dan "mengubah" cara berpikir mereka, serta mengungkapkan rasa terimakasih kepada pemerintah untuk pendidikan tersebut, dan berjanji untuk tidak kembali ke kebiasaan lama mereka.

Setiap mantan tahanan kamp yang diwawancara Amnesty International disiksa atau diperlakukan dengan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan (dalam laporan disebut sebagai "penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya") selama masa tahanan mereka. Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya adalah elemen utama dalam kehidupan di kamp tahanan. Siksaan dan perlakuan buruk lainnya yang dialami para tahanan di kamp jatuh dalam dua kategori besar.

Kategori pertama termasuk siksaan fisik dan non-fisik (yaitu, mental atau psikologis) serta perlakuan buruk lainnya yang dialami semua tahanan sebagai hasil dari efek kumulatif kehidupan sehari-hari di kamp. Kombinasi aktifitas fisik dan non-fisik seiring dengan hilangnya kontrol dan otonomi pribadi di kamp, kemungkinan besar mengakibatkan penderitaan mental dan fisik yang berat sehingga cukup untuk dikategorikan sebagai penyiksaan atau perlakuan buruk, tidak manusiawi, atau merendahkan lainnya.

Kategori kedua penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya termasuk siksaan fisik dan perlakuan buruk lainya yang terjadi selama interogasi atau sebagai hukuman atas perilaku salah oleh tahanan tertentu. Metode penyiksaan yang diterapkan selama interogasi dan sebagai hukuman termasuk pukulan, setruman listrik, posisi peregangan, penggunaan alat kekang yang tidak sesuai hukum (termasuk diikat di kursi macan), dibuat susah tidur, digantung di tembok, ditempatkan di tempat yang sangat dingin, dan ditahan di ruang isolasi. Interogasi biasanya berlangsung selama sejam atau lebih; hukuman kadang berlangsung lebih lama lagi.

Amnesty International mewawancarai banyak mantan tahanan yang disiksa atau mengalami perlakuan buruk lainnya selama interogasi atau hukuman di kamp tahanan. Amnesty juga mewawancarai banyak mantan tahanan yang menyaksikan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya atas tahanan lainnya atau berbicara dengan tahanan lainnya – biasanya rekan seruangan mereka – yang memberitahu bahwa mereka telah disiksa atau diperlakukan buruk saat diinterogasi atau sebagai hukuman.

Mantan tahanan mendeskripsikan secara umum pola konsisten perlakuan para tahanan oleh para staf dan petugas di kamp. Beberapa perlakuan ini merefleksikan pola penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya yang dilakukan oleh petugas keamanan Tiongkok di Xinjiang dan di bagian Tiongkok lainnya selama puluhan tahun. Mansur, seorang petani, mendeskripsikan bagaimana ia disiksa berulang kali di dua kamp selama masa tahanannya – baik ketika diinterogasi dan semasa menjalani berbagai sesi hukuman. Ia mendeskripsikan sesi interogasinya sebagai berikut:

"Dua penjaga mengambil saya dari ruang tahanan dan membawa saya ke ruangan [ruang interogasi]. Dua orang ada di dalam… [Mereka bertanya apa yang aku lakukan di Kazakhstan,] 'Engkau shalat di sana? Apa yang orangtuamu lakukan?' Saya jawab saya hanya tinggal dengan keluarga saya, menjaga hewan ternak dan tidak melakukan apapun yang illegal… mereka bertanya tentang masjid dan shalat… Jika saya mengatakan pada mereka saya telah shalat, saya bisa dihukum penjara 20 hingga 25 tahun. Jadi saya mengatakan saya tidak pernah shalat. Lalu mereka menjadi kesal. Mereka mengatakan, "Semua waktumu dengan hewan ternak membuatmu menjadi binatang juga!" Lalu mereka memukul saya dengan kursi hingga patah… Saya jatuh ke lantai. Saya hampir pingsan… Lalu mereka mendudukkan saya ke kursi lagi. Mereka bilang, 'orang ini belum berubah, ia harus tinggal [di kamp] lebih lama lagi'."

Amnesty International mendokumentasikan satu kejadian kematian di kamp tahanan yang diakibatkan oleh penyiksaan. Madi mengatakan pada Amnesty ia menyaksikan penyiksaan seorang tahanan seruangan yang kemudian ia ketahui meninggal akibat efek penyiksaan. Madi mengatakan orang tersebut dipaksa duduk di kursi macan di tengah ruang tahanan mereka. Para tahanan seruangan dipaksa menyaksikan ia duduk disana, terkekang, tak bisa bergerak selama tiga hari, dan secara tegas mereka dilarang membantunya.

"[Orang itu] berada di ruangan kami selama lebih dari dua bulan… ia dipaksa duduk di kursi macan. [Saya pikir ia dihukum karena mendorong penjaga.]… Mereka membawa kursinya ke ruangan kami… mereka mengatakan jika kami membantunya maka kami akan didudukkan di kursi tersebut… sebuah kursi besi… tangannya diborgol dan dirantai. Kakinya dirantai juga. Badannya diikat ke belakang kursi… Dua [borgol] mengekang pergelangan tangan dan kakinya… Benda karet dipasang di samping badannya sehingga membuatnya duduk tegak… pada titik tertentu kami bisa melihat testisnya. Ia akan [buang air kecil dan besar] di kursinya. Ia duduk di kursi selama tiga malam… Ia meninggal setelahnya [diambil keluar ruangan]. Kami tahu dari orang-orang di ruang tahanan."

Sebagian besar tahanan yang diwawancarai Amnesty berada di kamp antara sembilan hingga delapan belas bulan. Proses untuk menentukan bagaimana tahanan akan dibebaskan dari kamp dan dipulangkan tidaklah jelas, termasuk untuk kebanyakan tahanan. Seperti proses terkait awal penahanan dan transfer ke kamp tahanan, proses pembebasan juga sepertinya beroperasi di luar ranah sistem

pidana Tiongkok atau hukum domestik lainnya. Terdapat kekosongan total atas kriteria yang transparan atau bantuan hukum atau perlindungan. Pengalaman para tahanan, hingga masa pembebasan mereka tidak menunjukkan adanya pertimbangan untuk keadilan atau proses hukum sepantasnya yang diperlukan untuk menentukan tingkatan nasib-nasib individu tersebut. Para tahanan yang dibebaskan dipaksa menandatangani dokumen yang melarang mereka berbicara dengan siapapun – terutama jurnalis dan orang asing – tentang apa yang mereka alami di kamp. Mantan tahanan diberitahu bahwa mereka akan ditahan lagi jika melanggar larangan ini, juga anggota keluarga mereka.

Setelah dibebaskan dari kamp tahanan dan pulang ke rumah, para mantan tahanan mengalami pengekangan ketat lebih lanjut atas hak asasi mereka, terutama tentang hak atas kebebasan untuk bergerak. Pembatasan ini merupakan tambahan kebijakan diskriminatif yang diterapkan pada semua anggota etnis minoritas di Xinjiang. Hampir semua mantan tahanan yang berbicara dengan Amnesty diharuskan melanjutkan "Pendidikan" dan menghadiri kelas bahasa Tiongkok dan kelas ideologi politik setelah mereka dibebaskan. Mereka juga dipaksa membuat "pengakuan" secara publik tentang "kesalahan-kesalahan" mereka saat upacara bendera.

Semua mantan tahanan yang diwawancarai Amnesty International mengatakan mereka diawasi secara elektronik dan perorangan serta dievaluasi secara rutin oleh para kader dan petugas pemerintahan. Hampir semua mantan tahanan melaporkan petugas dan kader pemerintah diharuskan tinggal dengan mereka di rumah selama beberapa malam setiap bulan setelah mereka dibebaskan dari kamp. Selama beberapa bulan, hampir semuanya dilarang meninggalkan desa atau kota mereka. Jika mereka diizinkan keluar berarti mereka perlu terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pihak berwenang.

Amnesty mewawancarai mantan tahanan yang dikirim dari kamp untuk bekerja di pabrik. Arzu mengatakan pada Amnesty bahwa setelah ditahan selama enam bulan di sebuah kamp ia dipindahkan ke kamp lain, di mana ia diajarkan menjahit sebagai persiapan untuk dipekerjakan di sebuah pabrik. Kemudian ia dipaksa tinggal dan bekerja di sebuah pabrik selama beberapa bulan untuk membuat seragam pegawai pemerintah. Pernyataan yang diberikan mengungkapkan sejumlah cara yang dilakukan pihak berwenang di Xinjiang dalam memaksa atau mengharuskan orang-orang Uyghur dan anggota etnis minoritas lainnya di Xinjiang untuk melakukan beberapa tipe pekerjaan, terkadang sebagai perpanjangan "pendidikan" yang diterima di kamp tahanan.

Beberapa tahanan dilaporkan dipindahkan dari kamp ke penjara. Sebagaimana proses pembebasan untuk pulang ke rumah, proses yang tampaknya berlangsung untuk menjatuhkan hukuman penjara bagi tahanan di kamp juga tidak jelas. Tidak jelas bagaimana hubungan antara proses pembebasan dan proses penjatuhan hukuman – terutama bagaimana, atau jika, proses penjatuhan hukuman penjara di kamp terintegrasi dengan proses penjatuhan hukuman formal lainnya di luar kamp.

Amnesty International tidak bisa mewawancarai orang yang dijatuhi hukuman penjara di kamp dan kemudian dikirim ke penjara. Namun, Amnesty telah mewawancarai mantan tahanan kamp yang mengatakan bahwa mereka diberi hukuman kemudian "diampuni". Amnesty juga mewawancarai mantan tahanan yang mengatakan bahwa ketika mereka ditahan, satu atau lebih dari orang-orang di kelas mereka menerima hukuman penjara, seringkali untuk perilaku sehari-hari yang jauh dari berbagai bentuk pelanggaran hukum yang diakui. Banyak mantan tahanan mengenal orang lain secara pribadi – biasanya beberapa orang – yang dijatuhi hukuman penjara.

Pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan ekstensif yang secara ketat membatasi perilaku seluruh anggota kelompok etnis yang anggotanya sebagian besar beragama Islam, termasuk mereka yang tidak pernah masuk ke kamp atau penjara. Efektifitas brutal dan besarnya skala kampanye pemerintah berasal dari penerapan luas teknologi pengintaian yang belum pernah digunakan sebelumnya, diiringi dengan kemampuan untuk membuat sebagian besar dari masyarakat di wilayah tersebut membantu menjalankan rencana pemerintah. Pemerintah mengandalkan operasi pengintaian perorangan dan

elektronik yang tidak mungkin dihindari serta didesain untuk memastikan bahwa perilaku kelompok etnis minoritas terus-menerus dimonitor dan dievaluasi. Kader pemerintah yang ada di berbagai tempat, petugas keamanan yang penuh kekerasan, dan sistem hukum yang tidak independen berjalan beriringan dalam melakukan pengawasan dan menerapkan kebijakan yang melanggar hak.

Warga muslim yang tinggal di Xinjiang kemungkinan merupakan populasi yang paling banyak diintai di dunia. Pemerintah Tiongkok telah mengalokasikan sumber daya yang sangat besar untuk mengumpulkan informasi yang sangat detil tentang kehidupan kelompok ini. Pengintaian massal sistematis ini tercapai melalui kombinasi kebijakan dan praktik yang melanggar hak-hak manusia atas privasi dan kebebasan untuk bergerak serta berekspresi. Menurut mantan penghuni di Xinjiang sistem pengintaian melibatkan pengawasan perorangan dan elektronik yang ekstensif dan invansif dalam bentuk:

- Pengumpulan data biometrik, termasuk pindaian iris dari mata dan gambar muka;
- Wawancara invasif oleh petugas pemerintah;
- Pemeriksaan dan interogasi rutin oleh pasukan keamanan di berbagai tempat;
- "Inap rumah" oleh petugas dan kader pemerintah yang ditugaskan tinggal dengan keluarga-keluarga kelompok etnis minoritas;
- Hadirnya jaringan kamera pengintaian yang semakin luas, termasuk kamera pengenalan wajah;
- Jaringan luas pos-pos pemeriksaan yang dikenal sebagai "kantor polisi serba ada"; dan
- Akses yang tak terhingga atas alat komunikasi pribadi dan data finansial orang-orang.

Selain menyediakan pemerintah dengan informasi pribadi dalam jumlah besar, operasi ini membuat pihak berwenang bisa melacak secara komprehensif – dalam waktu berjalan – komunikasi, pergerakan, tindakan, serta perilaku masyarakat etnis minoritas di Xinjiang.

Warga muslim yang tinggal di Xinjiang tidak bisa bergerak secara bebas. Pemerintah membatasi perjalanan di dalam Xinjiang serta antara Xinjiang dengan wilayah lain di Tiongkok. Pemerintah juga mempersulit – seringkali tidak memungkinkan – anggota kelompok etnis minoritas, terutama Uyghur, untuk berpergian ke luar negeri. Semua anggota kelompok etnis minoritas di Xinjiang dipaksa menyerahkan paspor mereka ke pemerintah pada tahun 2016 dan 2017. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkannya kembali.

Mantan penghuni Xinjiang mengatakan pembatasan perjalanan diterapkan secara diskriminatif. Orang-orang yang diwawancarai mengatakan polisi hanya memberhentikan etnis minoritas di jalan dan memeriksa kartu identitas mereka. Para saksi mata, termasuk satu yang bekerja di pos pemeriksaan pemerintah, melaporkan etnis Tiongkok Han tidak perlu melalui pos pemeriksaan sama sekali atau diizinkan lewat tanpa adanya pemeriksaan atas badan atau telepon mereka serta tanpa ditanyai. Yin, seorang suku Han Tiongkok yang mengunjungi Xinjiang, mengatakan kepada Amnesty tentang diskriminasi yang ia saksikan ketika berkunjung:

"Kamera pengintaian ada di mana-mana… Diskriminasi berlangsung terang-terangan. Ketika saya naik kereta mereka tidak memeriksa saya sama sekali, namun mereka memeriksa tiket dan telepon orang Uyghur yang duduk di seberang saya… Ketika saya di stasiun, ada dua antrian [pemeriksaan keamanan], satu untuk orang Uyghur dan satu untuk suku Han yang tanpa penerapan teknologi pengenalan wajah, hanya melalui detektor logam. Antrian untuk orang Uyghur sangat panjang… Di bawah jembatan di [kota besar] saya hanya lewat saja, namun orang Uyghur harus diperiksa seluruh badannya dengan detektor logam, termasuk orang-orang tua. Mereka diperiksa di kedua sisi jembatan. Saya membawa koper namun tidak seorang pun memeriksa barang saya. Saya melewati pintu [keamanan], namun tidak ada seorang pun memeriksa dengan tongkat… Karena saya seorang Han, saya tidak diperiksa… Saya berbicara dengan seorang [petugas pemerintah] yang mengatakan, "Uyghur harus diperlakukan berbeda karena tidak ada seorang pun dari suku Han yang menjadi teroris'."

Warga muslim yang tinggal di Xinjiang tidak dapat mempraktikkan agama mereka. Mantan tahanan dan orang lainnya yang tinggal di Xinjiang antara 2017 dan awal 2021, yang diwawancarai oleh Amnesty International, juga mendeskripsikan suasana yang luar biasa tidak bersahabat terhadap praktik-praktik Islam. Ketika para individu ini meninggalkan Tiongkok, tidak ada lagi yang merasa nyaman menampilkan tanda-tanda praktik keagamaan dan semua percaya bahwa jika melakukannya mereka akan ditahan dan dikirim ke kamp. Menurut para saksi mata, sejumlah praktik keislaman yang dianggap penting bagi Muslim dalam agama mereka yang dulu tidak dilarang secara nyata oleh hukum di Xinjiang, kini telah dilarang. Muslim dihalangi melakukan shalat, mendatangi masjid, mengajar agama, menggunakan pakaian keagamaan, dan memberi nama keislaman pada anak. Sebagai hasil ancaman penahanan yang konstan dan kredibel, Muslim di Xinjiang memodifikasi perilaku sehingga mereka tidak lagi menampilkan tanda-tanda praktik keagamaan mereka di depan publik.

Banyak mantan penghuni Xinjiang mengatakan pada Amnesty bahwa mereka dilarang memiliki barang-barang keagamaan di rumah mereka atau konten keagamaan apapun di telepon mereka, termasuk buku, film atau foto keagamaan. Beberapa mantan penghuni mengatakan buku, barang-barang dan konten budaya lainnya yang terkait dengan budaya Muslim keturkian, telah dilarang. Aiman, kader pemerintah, mengatakan pada Amnesty bagaimana kader pemerintah dan polisi menyerbu rumah-rumah keluarga muslim dan menyita paksa semua barang-barang keagamaan:

“Kami mendatangi [bagian dari desa] yang mana 20 keluarga dari [kelompok etnis Muslim] tinggal. Kami harus mengambil semua yang berhubungan dengan agama dan menunjukkan pada mereka bahwa ini adalah barang terlarang… Ketika melakukan ini kami bahkan tidak mengetuk pintu… Kami langsung masuk tanpa izin… Orang-orang menangis… Kami memberikan semuanya ke polisi… Kami juga memberitahu mereka untuk membuang barang-barang dengan tulisan Arab.”

Menurut bukti-bukti yang dikumpulkan Amnesty International, dan telah dikoroborasi dengan sumber terpercaya lainnya, anggota kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam di Xinjiang menjadi sasaran serangan yang memenuhi semua elemen kontekstual kejahatan atas kemanusiaan berdasarkan hukum internasional. Bukti-bukti yang dilihat Amnesty memberikan basis fakta untuk menyimpulkan para pelaku, yang bertindak atas nama negara Tiongkok, telah menjalankan serangan yang luas dan sistematis yang diarahkan pada penduduk sipil di Xinjiang. *Amnesty International percaya bukti-bukti yang terkumpul memberikan basis fakta-fakta untuk menyimpulkan pemerintah Tiongkok telah melakukan paling tidak kejahatan atas kemanusiaan sebagai berikut: pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik lainnya yang melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional; penyiksaan; dan persekusi.*

Pemerintah Tiongkok harus segera menutup semua kamp penahanan yang tersisa dan membebaskan semua orang yang ditahan di kamp tahanan atau fasilitas tahanan lainnya – termasuk penjara – di Xinjiang, kecuali ada bukti yang meyakinkan dan dapat diterima pengadilan bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum yang diakui secara internasional. Pemerintah harus mencabut atau mengubah semua undang-undang dan peraturan, dan mengakhiri semua kebijakan dan praktik terkait, yang mengekang secara tidak sah izin hak asasi manusia warga Uyghur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas yang sebagian besar beragama Islam lainnya, termasuk hak untuk secara bebas meninggalkan dan kembali ke Tiongkok serta untuk memilih dan mempraktikkan agama mereka.

Perlu ada investigasi independen dan efektif atas dugaan kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat lainya yang terdokumentasi dalam laporan ini. Semua yang diduga terlibat dan bertanggungjawab dalam tindak pidana tersebut harus dibawa ke hadapan pengadilan yang memenuhi prinsip peradilan yang adil. Dewan HAM PBB atau Majelis Umum PBB harus membentuk mekanisme internasional yang independen untuk menginvestigasi kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran HAM berat lainnya di Xinjiang, dengan tujuan menjamin akuntabilitas, termasuk dengan mengidentifikasi para terduga pelaku.

REKOMENDASI

UNTUK PEMERINTAH TIONGKOK:

- Secepatnya membebaskan semua orang yang ditahan di kamp tahanan atau fasilitas penahanan lainnya – termasuk penjara – di Xinjiang, kecuali ada bukti yang kredibel untuk bisa diproses oleh pengadilan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran hukum yang diakui secara internasional, kemudian dipindah ke fasilitas penahanan yang diakui, dan diberikan pengadilan yang adil sesuai dengan standar internasional.
- Membolehkan semua yang ditahan untuk melakukan perlawanan hukum atas penahanan mereka.
- Memberikan anggota keluarga orang-orang yang ditahan di kamp, penjara, atau fasilitas penahanan lainnya – termasuk yang tinggal di luar negeri – dengan alasan penahanan tertulis dan dokumentasi resmi lainnya terkait dengan kasus anggota keluarga mereka.
- Menutup pusat-pusat "pelatihan vokasi", "transformasi melalui pendidikan", dan "de-ekstrimifikasi" (yang sebenarnya kamp-kamp tahanan) di Xinjiang.
- Memastikan tidak ada seorang pun yang ditahan secara sewenang-wenang, dihilangkan paksa, atau disiksa dan mendapatkan perlakuan buruk lainnya.
- Saat menunggu pembebasan mereka, memastikan semua orang yang dibawa masuk atau ditahan di kamp-kamp ini memiliki akses cepat dan rutin atas pengacara pilihan mereka, tenaga medis independen, dan anggota keluarga mereka.
- Memastikan semua orang di Xinjiang bisa bebas berkomunikasi dengan anggota keluarga dan orang lainnya, termasuk yang tinggal di luar negeri, kecuali pembatasan spesifik atas komunikasi tersebut bisa dibenarkan berdasarkan hukum HAM internasional.
- Mencabut atau mengubah semua undang-undang dan peraturan, serta mengakhiri semua kebijakan dan praktik, yang mengekang secara tidak sah HAM warga Uyghur, Kazakh, dan kelompok etnis yang sebagian besar menganut Islam lainnya, termasuk hak untuk meninggalkan dan pulang kembali ke Tiongkok.
- Membolehkan semua orang, termasuk umat Muslim dan anggota komunitas agama atau kepercayaan lainnya, untuk memilih dan mempertahankan agama atau kepercayaan mereka, serta untuk menunjukkannya secara damai melalui ibadah, ketaatan, praktik, dan pengajaran, baik secara terbuka atau privat.
- Memastikan semua ketentuan hukum yang bertujuan melindungi keamanan nasional atau diciptakan atas nama anti-terorisme didefinisikan secara jelas dan sempit serta selaras dengan hukum dan standar HAM internasional.
- Melalukan investigasi imparsial, independen, cepat, efektif, dan transparan atas setiap orang yang diduga bertanggungjawab atas tindakan pidana berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran berat HAM lainnya atas warga Uyghur, Kazak, atau kelompok etnis yang anggotanya sebagian besar beragama Islam lainnya di Xinjiang. Memastikan terduga pelaku dibawa ke hadapan hukum melalui pengadilan yang adil tanpa menggunakan hukuman pidana mati.
- Secepatnya mengizinkan ahli HAM PBB, penyelidik independen HAM, dan jurnalis untuk mengakses tanpa batas semua tempat di Xinjiang, termasuk kamp tahanan dan penjara.

- Bekerja sama secara penuh dan efektif dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Prosedur Spesial dan investigasi yang dipimpin PBB lainnya atau pengawas independen dan mekanisme investigasi HAM internasional lainnya.
- Memberikan ganti rugi penuh, efektif, sensitif jender dan transformatif sesuai dengan hukum dan standar internasional kepada mantan tahanan dan keluarga korban kejahatan hukum internasional dan pelanggaran HAM lainnya.
- Berhenti meminta negara lain memulangkan orang-orang ke Tiongkok, yang melanggar prinsip non-refoulement (tidak memulangkan kembali).
- Menghentikan setiap bentuk gangguan dan intimidasi terhadap warga Uyghur, Kazakh, dan kelompok etnis yang anggotanya sebagian besar beragama Islam lainnya yang memiliki hubungan dengan Tiongkok tapi tinggal di negara lain.

KEPADA DEWAN HAM PBB:

- Menyelenggarakan sesi khusus atau debat secara mendesak dan mengadopsi sebuah resolusi yang menetapkanmekanisme internasional independen untuk menyelidiki kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran berat HAM lainnya di Xinjiang, dengan tujuan memastikan akuntabilitas, termasuk dengan mengidentifikasi terduga pelaku. Mekanisme tersebut harus:
  - Memiliki mandat untuk memonitor secara dekat, menganalisa, melaporkan, dan membuat rekomendasi untuk mencegah pelanggaran HAM, dan untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menjaga, dan menganalisis bukti-bukti kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran HAM berat lainnya;
  - Memiliki mandat untuk menyusun kasus berdasarkan standar hukum pidana yang bisa digunakan untuk mekanisme penuntutan serta yudisial di masa depan yang memenuhi standar keadilan internasional dan tidak melibatkan hukuman mati;
  - Berisikan staf-staf ahli internasional independen; termasuk ahli hukum HAM internasional, hukum pidana internasional, struktur komando pasukan keamanan, ahli kekerasan seksual dan kekerasan berbasis jender lainnya, hak-hak anak, hak orang dengan disabilitas, verifikasi video dan gambar, serta analisis forensik;
  - Memiliki sumberdaya yang memadai, termasuk finansial dan teknis, untuk menjalankan mandatnya; serta
  - Diminta menyampaikan perkembangan dan laporan komprehensif secara rutin tentang situasi terkini di Xinjiang kepada Dewan HAM dan Majelis Umum PBB serta memberikan uraian ringkas kepada Dewan Keamanan PBB dan badan PBB relevan lainnya.

KEPADA DEWAN KEAMANAN PBB:

- Menggelar pertemuan rutin, formal, dan terbuka tentang situasi di Xinjiang yang mengizinkan entitas PBB yang relevan, juga anggota masyarakat sipil dan pembela HAM lainnya, untuk memberikan uraian ringkas kepada anggota Dewan Keamanan PBB secara langsung tentang situasi terbaru di Xinjiang.
- Mengadopsi sebuah resolusi yang memberikan pesan jelas yang mengutuk situasi di Xinjiang dan menuntut penutupan sistem kamp tahanan dan semua hukum, peraturan serta tindakan dan kebijakan terkait yang mengekang hak-hak warga Uyghur, Kazakh, dan kelompok etnis yang sebagian besar anggotanya beragama Islam lainnya secara ilegal, kepada pihak berwenang Tiongkok. Resolusi tersebut harus menuntut akses secara cepat dan tanpa batas ke Xinjiang untuk penyidik HAM independen.

KEPADA MAJELIS UMUM PBB:

- Jika Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi sebuah resolusi, maka Majelis Umum PBB perlu mengadopsi resolusi komprehensif untuk situasi HAM di Xinjiang dengan redaksi yang keras yang mengutuk pelanggaran HAM di Xinjiang dan secara spesifik menuntut akuntabilitas atas pelanggaran tersebut.
- Mengekspresikan dukungan atas mekanisme yang dipimpin PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Xinjiang, untuk mengumpulkan dan menjaga alat bukti, dan menyiapkan kasus untuk penuntutan pidana. Berjanji menyediakan dukungan finansial, teknis, dan dukungan lainnya untuk mekanisme tersebut. Jika badan PBB lainnya gagal membentuk mekanisme tersebut, maka Majelis Umum PBB harus bergerak cepat membentuk mekanisme penyelidikan, sebagaimana telah dilakukannya di masa lalu.

KEPADA SEKRETARIS JENDERAL PBB:

- Mengirim pesan terbuka secara jelas kepada pihak berwenang Tiongkok bahwa tindakan dan praktik mereka terhadap warga Uyghur, Kazakh, dan anggota kekompok etnis lain yang sebagian besar anggotanya beragama Islam, melanggar hukum dan harus dihentikan secepatnya.
- Memastikan semua institusi dan badan PBB termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memenuhi mandat mereka untuk mengawasi dan melaporkan situasi di Tiongkok dan merasa berwenang untuk berbicara terbuka bila diperlukan.

KEPADA KOMISARIS TINGGI PBB UNTUK HAM:

- Melakukan pengawasan dan penilaian jarak jauh terhadap situasi di Xinjiang dan melaporkan secara terbuka situasi tersebut, sesuai dengan mandat independen berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 48/141, denganmemberikan rekomendasi untuk langkah-langkah selanjutnya.
- Memberikan uraian kepada Dewan HAM tentang situasi tersebut secara mendesak, selaras dengan resolusi Dewan HAM 45/31, yang secara tegas meminta Komisaris Tinggi menyediakan informasi tentang "pola pelanggaran HAM yang mengarah kepada peningkatan risiko darurat HAM… kepada anggota dan pengamat di Dewan HAM dengan cara yang merefleksikan kegentingan situasi tersebut… termasuk dengan memberikan uraian-uraian ringkas."

KEPADA KOMUNITAS INTERNASIONAL SECARA KESELURUHAN:

- Menggunakan jalur bilateral, multilateral, dan regional yang bisa anda gunakan, termasuk yang dimandatkan oleh PBB, untuk mendorong pihak berwenang Tiongkok agar secepatnya mengakhiri semua pelanggaran berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran HAM lainnya, untuk mengizinkan penyelidik HAM independen akses tak terbatas di Xinjiang, serta membongkar sistem diskriminasi dan persekusi atas etnis minoritas di Xinjiang.
- Membolehkan semua orang yang menghindari kekerasan dan persekusi di Xinjiang untuk memasuki negara anda secepatnya dan tanpa halangan, serta memastikan mereka memiliki akses secepatnya ke proses suaka jika diinginkan, ke bantuan hukum, ke penilaian menyeluruh atas risiko pelanggaran HAM yang akan mereka hadapi jika pulang ke Tiongkok, dan ke kemampuan untuk secara hukum melawan perintah pemulangan (deportasi) atau pemindahan paksa.

- Secara tegas menghormati dan menerapkan prinsip non-refoulement (tidak memulangkan kembali) atas semua orang, termasuk pengungsi dan pencari suaka, dari Xinjiang. Menghentikan semua transfer paksa, secara langsung atau tidak langsung, ke Tiongkok dan menjamin tidak ada seorang pun yang dipaksa pulang ke situasi di mana mereka menghadapi risiko serius pelanggaran HAM berat, termasuk penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan penyangkalan terang-terangan atas hak peradilan yang adil, diskriminasi sistematis, atau persekusi.

AMNESTY INTERNATIONAL ADALAH SEBUAH GERAKAN GLOBAL UNTUK HAK ASASI MANUSIA. KETIKA KETIDAKADILAN MENIMPA SATU ORANG MAKA INI PENTING BAGI KITA SEMUA.

HUBUNGI KAMI

info@amnesty.org

+44 (0)20 7413 5500

BERGABUNG DALAM PERCAKAPAN KAMI

www.facebook.com/AmnestyGlobal

@Amnesty

“KAMI BAGAIKAN MUSUH DALAM PEPERANGAN”

PENAHANAN MASSAL, PENYIKSAAN, DAN PERSEKUSI TIONGKOK TERHADAP MUSLIM DI XINJIANG

Sejak tahun 2017, berselubungkan kampanye melawan “terorisme”, pemerintah Tiongkok telah melakukan perbuatan sewenang-wenang secara masif dan sistematis terhadap warga muslim yang tinggal di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (Xinjiang). Bertolak belakang dengan respon yang sah terhadap kemungkinan ancaman teroris, kampanye pemerintah justru memperlihatkan secara jelas niat untuk menarget bagian-bagian dari populasi Xinjiang secara kolektif berdasarkan agama dan etnisitas serta menggunakan kekerasan dan intimidasi berat untuk memberangus praktik-praktik kepercayaan agama Islam dan etnik-budaya muslim berakar Turki. Untuk mencapai tujuan indoktrinasi politik dan asimilasi budaya paksa ini, pemerintah menjalankan kampanye penahanan massal sewenang-wenang. Sejumlah besar pria dan perempuan dari kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam telah ditahan. Sistem kamp tahanan merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar untuk menundukkan dan mengasimilasi paksa etnis minoritas di Xinjiang.

Temuan dan kesimpulan laporan ini didasari pada kesaksian tangan pertama yang dikumpulkan Amnesty International dari mantan tahanan di kamp tahanan tersebut dan orang-orang yang berada di Xinjiang setelah tahun 2017, juga dari analisis gambar dan data satelit. Bukti-bukti yang dikumpulkan Amnesty International menjadi fakta-fakta dasar untuk menyimpulkan pemerintah Tiongkok telah melakukan, setidaknya, kejahatan atas kemanusiaan sebagai berikut: pemenjaraan atau pengekangan kebebasan fisik berat yang melanggar aturan dasar hukum internasional; penyiksaan; dan persekusi.

Pemerintah Tiongkok harus secepatnya menutup semua kamp tahanan yang masih buka dan membebaskan semua orang yang ditahan di kamp tahanan atau fasilitas tahanan lainnya- termasuk penjara- di Xinjiang, kecuali bila ada bukti kredibel yang bisa digunakan di pengadilan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran yang diakui secara internasional. Perlu adanya investigasi independen dan efektif atas dugaan kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM lainnya yang terdokumentasi di laporan ini. Semua orang yang diduga bertanggungjawab secara pidana harus dibawa ke hadapan hukum dengan prinsip peradilan yang adil.

Indeks: ASA 17/4137/2021

Juni 2021

amnesty.org

AMNESTY INTERNATIONAL